BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Perlindungan Konsumen memiliki dasar hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), tepatnya pada Pembukaan Alinea ke-4. Di dalamnya disebutkan “.....Melindungi segenap Bangsa Indonesia”. Hukum perlindungan konsumen menjadi fokus utama karena berkaitan dengan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan konsumen.¹ Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar hukum yang memastikan setiap warga negara Indonesia berhak atas kehidupan yang layak dan perlindungan dari negara. Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh rakyatnya, meningkatkan kesejahteraan bersama, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini mencerminkan tujuan utama negara yaitu untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara dan aset negara.²

Menurut ketentuan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengertian perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan

¹ Bernadeta Alvina Diva, dkk., *Perlindungan Konsumen terhadap Ketidaksihonestan Tampilan Pangan Pada Label Produk*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9 No.15, Tahun 2023, hal. 45.

² Siti Rahmah Tumanggor, dkk., *Analisis Peran Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol. 4 No.4, Tahun 2024, hal. 5600.

perlindungan kepada konsumen di Indonesia. Fokus utama dari hukum perlindungan konsumen adalah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, sehingga harus mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur, mengawasi, dan mengendalikan berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, dengan harapan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat terwujud.³ Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur berbagai hak konsumen, termasuk hak untuk memperoleh produk yang aman dan informasi yang benar. Karena salah satu hak dasar yang sangat penting untuk dilindungi adalah kepastian hukum bagi konsumen.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar terhadap cara perdagangan di Indonesia. Pertumbuhan pesat *e-commerce* di tanah air dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan perubahan signifikan, yang didorong oleh peningkatan infrastruktur digital serta akses internet yang semakin meluas di berbagai wilayah. *E-commerce* kini menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam bertransaksi jual beli. Beberapa platform *e-commerce* besar, seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada, telah menguasai pasar Indonesia. Keunggulan *e-commerce* adalah kemudahan yang ditawarkan bagi konsumen untuk membeli berbagai produk secara online, termasuk produk kosmetik. Salah satu platform *e-commerce* populer di Indonesia adalah Lazada yang menyediakan

³ Yanci Libria Fista, dkk., *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Binamulia Hukum, Vol. 12 No. 1, Tahun 2023, hal. 179.

beragam produk kosmetik mulai dari perawatan kulit *skincare* dan *makeup*, hingga produk perawatan tubuh dengan berbagai pilihan harga dan merek baik merek lokal maupun internasional.

Industri kosmetik di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data dari Kementerian Perindustrian, pertumbuhan sektor industri kosmetik diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2028 sehingga diperkirakan dalam kurun waktu 2024 hingga 2028 industri kosmetik di Indonesia akan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,35% per tahun.⁴ Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan diri dan tren kecantikan yang semakin populer di media sosial. Hal ini juga menyebabkan penjualan kosmetik melalui platform *e-commerce* semakin berkembang pesat dan mengubah cara konsumen membeli produk kecantikan. Karena saat ini konsumen dapat dengan mudah berbelanja kosmetik dari rumah tanpa perlu pergi ke toko fisik.

Fenomena peredaran kosmetik ilegal di Indonesia yakni produk kecantikan yang dijual tanpa izin dari BPOM semakin mendapatkan perhatian publik. Banyak produk kosmetik yang beredar di pasaran tanpa melalui proses pengujian dan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Meskipun industri kosmetik mengalami perkembangan yang pesat, masalah peredaran kosmetik tanpa izin ini menjadi hal yang serius. Berdasarkan data tahun 2024, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Kementerian Perdagangan telah

⁴ <https://ikm.kemenperin.go.id/kemenperin-pacu-km-kosmetik-maksimal-pasar-yang-ekspansif>, diakses pada tanggal 17 November 2024.

mengamankan sebanyak 415.035 buah kosmetik ilegal termasuk yang dijual melalui platform *e-commerce*.⁵ Produk-produk tersebut berisiko membahayakan kesehatan konsumen, karena tidak melewati uji keamanan dan tidak memenuhi standar kandungan bahan yang ditetapkan.

Peredaran kosmetik tanpa izin BPOM di platform *e-commerce* dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Dari segi kesehatan, konsumen berisiko mengalami masalah serius seperti iritasi kulit, alergi, hingga kerusakan organ dalam tubuh dalam jangka panjang. Kosmetik ilegal yang tidak terdaftar di BPOM seringkali mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokinon, atau zat kimia lainnya yang dapat membahayakan kesehatan.⁶ Sementara itu, dari sisi ekonomi, peredaran kosmetik tidak memiliki izin BPOM ini merugikan produsen kosmetik yang telah mematuhi aturan dan memenuhi standar keamanan untuk mendapatkan izin edar dari BPOM, mengingat mereka harus mengeluarkan biaya besar untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

Mengacu kepada Penelitian yang dilakukan oleh Rizal Satria Heryansyach dan Rosalinda Elsina Latumahina Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2022 dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Ilegal Secara Online*.⁷ Dalam penelitian

⁵ <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bpom-kemendag-amankan-415-ribu-buah-kosmetik-impor-ilegal>, diakses pada tanggal 17 November 2024.

⁶ <https://theconversation.com/merkuri-di-kosmetik-ilegal-paraben-di-kosmetik-legal-apa-fungsi-dan-dampak-paraben-pada-kesehatan-208286>, diakses pada tanggal 17 November 2024.

⁷ Rizal Satria Heryansyach dan Rosalinda Elsina Latumahina, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Ilegal Secara Online*, Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 2 No. 1, Tahun 2022, hal. 130.

tersebut penulis membahas tentang peredaran kosmetik ilegal yang diperjualbelikan secara online melalui *e-commerce*. Penelitian tersebut khusus menyoroti peredaran kosmetik ilegal secara online. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam tulisan ini yakni difokuskan kepada kosmetik yang tidak memiliki izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di *e-commerce* Lazada.

Masalah peredaran kosmetik ilegal semakin marak terjadi di *e-commerce* Lazada. Masih banyak sekali pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan hukum. Banyak produk kosmetik yang beredar di *e-commerce* Lazada tidak mencantumkan label pada produk, tidak memberikan informasi yang seharusnya ada seperti : nama produk, ukuran, berat/isi bersih, komposisi, tanggal pembuatan, serta petunjuk penggunaan produk.⁸ Semua informasi ini penting untuk mencegah dampak negatif dari penggunaan produk kosmetik. Tanpa informasi yang jelas, konsumen tidak mengetahui dengan pasti kandungan yang terdapat pada produk kosmetik tersebut yang mungkin akan berpotensi membahayakan konsumen. Produk kosmetik di *e-commerce* Lazada juga masih banyak yang tidak mencantumkan nomor BPOM pada deskripsi produk. Selain itu, banyak produk kosmetik yang dijual di *e-commerce* lazada yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Sehingga produk tersebut tidak diketahui kejelasan serta bagaimana asal usulnya. Ketika masih banyak produk kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin BPOM dijual di *e-*

⁸ Yulia Susantri, dkk., *Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Hak Konsumen*, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 2 No. 1, Tahun 2018, hal. 114.

commerce Lazada maka akan berdampak negatif pada konsumen yang membeli produk kosmetik tersebut. Oleh karena itu, produk kosmetik yang beredar di pasar termasuk *e-commerce* Lazada haruslah memiliki izin edar BPOM serta mencantumkan hasil uji lab terhadap komposisi dari *ingredients* produk kosmetik tersebut.

Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika mewajibkan setiap produk kosmetik yang beredar di Indonesia untuk memiliki izin edar dari BPOM. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Platform *e-commerce* seperti Lazada memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dijual di platform mereka mematuhi peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik diwajibkan untuk menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Hal ini juga mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa produk yang diperdagangkan memiliki legalitas yang jelas. Namun meskipun sudah terdapat aturan tersebut, masih banyak kosmetik tanpa izin BPOM yang dijual dan beredar di *e-commerce* Lazada. Atas dasar latar belakang di atas penulis tertarik menulis skripsi dengan judul **"Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Tidak memiliki Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan di *E-Commerce* Lazada."**

1.2 Permasalahan

Atas dasar latar belakang di atas maka peneliti merumuskan permasalahan antara lain :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli kosmetik tanpa izin BPOM di *e-commerce* lazada ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum *e-commerce* lazada terhadap penjualan kosmetik tanpa izin BPOM ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli kosmetik tanpa izin BPOM di *e-commerce* lazada
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum *e-commerce* lazada terhadap penjualan kosmetik tanpa izin BPOM

1.4 Manfaat Penelitian

- Manfaat Teoritis :

Penelitian ini akan memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum perdagangan elektronik terkait peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM di *e-commerce*. Penelitian ini juga berupaya memperkaya kajian akademis tentang pengawasan produk kosmetik dalam transaksi *e-commerce* yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi BPOM. Selain itu, penelitian ini

akan menambah referensi dalam kajian hukum terkait tanggung jawab platform *e-commerce* dalam mencegah peredaran kosmetik tanpa izin BPOM, serta memberikan perspektif baru dalam studi hukum kesehatan mengenai pengawasan produk kosmetik di era digital terutama di platform *e-commerce* seperti Lazada.

- Manfaat Praktis :

Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam penyempurnaan regulasi terkait pengawasan peredaran kosmetik di platform *e-commerce*. Penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi mengenai penguatan sistem pengawasan produk kosmetik di platform digital, serta menyarankan langkah-langkah yang dapat diambil oleh pihak *e-commerce* untuk meningkatkan proses verifikasi produk kosmetik yang dijual. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan kebijakan internal pihak *e-commerce* untuk mencegah peredaran kosmetik tanpa izin BPOM. Penelitian ini juga akan memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab hukum platform *e-commerce* dalam mengatasi peredaran kosmetik tanpa izin BPOM dan memberikan panduan tentang cara mengidentifikasi kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM di platform digital serta penelitian ini membantu konsumen memahami hak-haknya apabila menemukan produk kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM di platform *e-commerce* khususnya di Lazada.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute Approach* adalah suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah suatu peraturan Perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.⁹

Sedangkan *conceptual approach* adalah suatu pendekatan penelitian yang beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga peneliti akan menemukan ide-ide atau pemikiran-pemikiran dan akan menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumenasi hukum dan memecahkan suatu permasalahan hukum.¹⁰

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memecahkan masalah hukum, baik berhubungan dengan aspek akademik maupun praktisi yang mencakup analisis terhadap dasar-dasar hukum, norma-norma hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat serta fenomena hukum yang terjadi dalam kehidupan

⁹ Petter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 93.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 138.

masyarakat.¹¹ Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang dilakukan oleh negara. Dalam Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1176/Menkes/Per/IV/2011 tentang Kosmetik
- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- g. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- h. Peraturan Kepala BPOM No. 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik

¹¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 19.

- i. Peraturan Kepala BPOM No. 18 Tahun 2016 tentang Pengawasan Pasar Kosmetik
- j. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
- k. Peraturan Kepala BPOM No. 12 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Kosmetik

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah sumber bahan hukum yang merupakan bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Dalam penelitian ini menggunakan jurnal-jurnal hukum terkait perlindungan konsumen, *e-commerce*, kosmetik, dan hukum perizinan serta menggunakan artikel ilmiah terkait kosmetik ilegal. Kemudian penelitian ini juga menggunakan buku-buku terkait hukum perlindungan konsumen di Indonesia, *e-commerce*, dan hukum perizinan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah sumber bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terkait sumber bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kemudian penelitian ini menggunakan berita pada Kementerian Perindustrian tentang pertumbuhan kosmetik di Indonesia, berita pada Kementerian Perdagangan serta BPOM tentang pengamanan kosmetik ilegal, data

Kementrian Perdagangan terkait perdagangan digital *e-commerce* di Indonesia periode 2023, data dari Tokopedia terkait lisensi produk penjualan, data dari Shoppe terkait kebijakan penjualan barang, serta data dari Lazada tentang kebijakan penjualan kosmetik.

1.5.4 Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik pengambilan bahan hukum penelitian ini menggunakan pengumpulan data normatif yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan dari bahan-bahan hukum seperti Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian hukum mengenai segala hal yang terkait dengan permasalahan di atas.¹²

Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pengolahan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Setelah disusun secara sistematis kemudian dianalisa dengan menggunakan metode preskriptif yaitu bagaimana seharusnya dan analisa dikembalikan pada norma hukum sehingga diperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.¹³

¹² Sigit Sapto Nugroho, dkk., 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Cetakan Pertama, Oase Pustaka, hal. 70.

¹³ *Ibid.*, hal. 94.